



KAMIS, 27 DESEMBER 2018

SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek Irigasi Berpotensi Rugikan Rp2,098 M

BENGKULU - Tim investigasi Rakyat Bengkulu (RB) kembali menemukan potensi kerugian negara yang cukup besar dalam kegiatan swakelola di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2017. Yakni pada kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan irigasi.

Dalam proyek ini, diduga pembayaran upah pekerja tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, sebesar Rp 2,098 miliar. Modusnya hampir sama dengan kelebihan pembayaran upah tenaga kerja pemeliharaan, yakni diduga melebihi hari seharusnya bekerja.

Telisik tim **RB**, kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas PUPR berdasarkan surat Plt. Dinas PUPR nomor 503/1617/II/B.III-DPU-TR/2017 tertanggal 6 Februari 2017 perihal izin prinsip swakelola pelaksanaan pekerjaan operasional dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi kewenangan Provinsi Bengkulu. Dengan anggaran sebesar Rp 5,29 miliar. Realisasi pekerjaan sebesar Rp 5,01 miliar. Terdiri dari belanja pemeliharaan jaringan irigasi Rp 4,76 miliar, kemudian belanja jasa penjaga pintu air Rp 180,73 juta, belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 84,6 juta belanja perjalanan dinas luar daerah Rp 12,7 juta dan honorarium pejabat pengelola kegiatan Rp 28,49 juta.

Kemudian penggunaan belanja pemeliharaan jaringan irigasi meliputi upah penebasan dan pembersihan saluran Rp 3,15 miliar, upah galian tanah biasa dengan tenaga manusia Rp 1,47 miliar, honorarium pembuatan laporan dan dokumentasi Rp 48,75 juta, upah timbunan tanggul dengan tenaga manusia Rp 10,11 juta, pembelian tanah timbunan Rp 9,7 juta pembuatan blangko longstad Rp 9,7 juta upah plesteran Rp 740 juta dan pembelian bahan bangunan Rp 197 juta. Dengan total penggunaan belanja pemeliharaan jaringan irigasi ini Rp 4,70 miliar. Jumlah total Rp 5,01 miliar.

Ada 13 jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu, yang meliputi wilayah Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kaur, Bengkulu Utara dan Seluma. Kegiatan optimalisasi fungsi irigasi ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari dua orang, yaitu satu orang kepala pelaksana dan satu orang pelaksana. Mereka diangkat melalui

SK Kepala Dinas PUPR. Kemudian kegiatan ini direncanakan dan diawasi oleh tim perencana dan pengawas yang hanya terdiri dari satu orang saja. Tim perencana dan pengawas ini di angkat berdasarkan SK nomor 061.1-0.27 tertanggal 6 Februari 2017. Tim pelaksana dan tim Perencana dan Pengawasan kegiatan memiliki tugas dan tanggung jawab sama yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

Pekerjaan pemeliharaan irigasi terdiri dari 2 pekerjaan utama, yaitu penebasan/pembersihan saluran irigasi dari tanaman dan penggalian tanah sedimen saluran irigasi. Pekerjaan ini menggunakan tenaga manusia dan alat manual. Selain itu juga ada pekerjaan minor yaitu penimbunan plesteran.



SUMBER BERITA

KAMIS, 27 DESEMBER 2018

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Proyek Irigasi Berpotensi Rugikan Rp2,098 M

Dalam surat pertanggungjawaban, dibandingkan dengan data dalam laporan pekerjaan dan dokumentasi foto terdapat indikasi bahwa jumlah pekerja dan hari dalam SPJ lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pekerja dan hari sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya pemeriksaan melakukan wawancara kepada KPA, PPTK dan pelaksana pemeliharaan pada tanggal 13 April 2018. Berdasarkan keterangan yang didapat, diketahui terdapat kelemahan dalam pembuatan SPJ.

Ada beberapa modus, pertama SPJ dibuat berdasarkan perhitungan rencana kebutuhan pekerja masing-masing irigasi dan bukan berdasarkan jumlah pekerjaa riil di lapangan. Jumlah pekerja riil di lapangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pekerja dalam SPJ.

Pembuatan laporan tidak berdasarkan progres fisik harian di lapangan nilai progres harian dalam laporan adalah nilai yang besarnya mendekati nilai total volume pekerjaan per daerah irigasi dibagi dengan hari perencanaan pekerjaan.

Pelaksana dan pengawas tidak melakukan supervisi pekerjaan setiap hari tetapi, hanya 2-3 kali dalam seminggu dan tidak ada absensi harian. Selain itu juga pelaksanaan pemeliharaan menjelaskan bahwa mandor sebenarnya di lapangan

adalah petugas penjaga pintu air atau pengamat daerah irigasi. Sedangkan mandor dalam SPJ adalah pekerja atau orang tidak ikut bekerja tetapi terlampir fotokopi sebanyak-mandor dalam SPJ.

Jumlah pekerja dan jumlah hari dalam yang SPJ dibuat berdasarkan perhitungan analisis kebutuhan pekerja masing-masing daerah irigasi sesuai dengan pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang Pu yang diterbitkan oleh Balitbang PU tahun 2013, dan bukan berdasarkan jumlah pekerja dan jumlah hari riil di lapangan. Dalam SPJ diketahui bahwa total upah pekerja penebasan adalah Rp 3.15 miliar. Sedangkan upah galian sebesar Rp 1,47 miliar.

Saat itu KPA, PPTK dan pelaksana sudah melakukan klarifikasi sesuai dengan BAPK adalah sebesar Rp 3,5 miliar. Sehingga pembayaran upah pekerja penebasan dan galian tanah terindikasi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya Rp 1,12 miliar. Yakni Rp 3,15 miliar + Rp 1,47 miliar - Rp 3,50 miliar. (Untuk persis dugaan kelebihan bayar tersebut lihat grafis).

Sementara itu Asisten II Pemda Provinsi Bengkulu Yuliswani mengatakan kalau temuan dalam proyek swakelola tersebut kemungkinan besar sudah dikembalikan. "Itu mungkin sudah dikembalikan kelebihan pembayarannya," terangnya.

Dia juga menjelaskan, temuan-temuan BPK terhadap potensi kerugian negara juga sudah banyak ditindak lanjuti. Sehingga akhirnya Provinsi Bengkulu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LHP LKPD 2017 dari BPK. "Terkait berapa yang sudah dikembalikan memang belum bisa dipublikasikan. Nanti setelah selesai baru," katanya.

Sementara itu Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, Ir Mulyani atau kerap disapa Ning mengatakan tahun 2017 dia belum menjadi Kepala Bidang Bina Marga. Dia tidak bisa memberikan komentar terkait dengan hal itu. "Saya belum bisa memberikan komentar kalau masalah itu," katanya. (del)